

LHP Kabupaten Landak Tetap WDP

Andika Lay
BorneoTribune, Landak

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, pekan lalu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011.

LHP tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak, Klemen Apui, SIP dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Drs. Ludis, M.Si, Inspektur Daerah Kabupaten Landak dan Pejabat di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Kabupaten Landak pada tahun sebelumnya, Tahun Anggaran 2010, juga memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP).

"LHP atas laporan keuangan TA 2011 ini, Pemkab Landak kembali memperoleh opini WDP," kata Adi Sudiby, Rabu (1/8).

Dikatakan olehnya, ada pun yang menjadi permasalahan utama pada Pemkab Landak, yakni, nilai persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.932.644.631,00 belum didukung dengan pengelolaan yang memadai, dimana saldo disajikan berdasarkan *stock opname*, namun tidak didukung dengan kartu stok dan pencatatan mutasi persediaan dalam kartu stok belum tertib.

Selain itu, masih menu rutnya, permasalahan yang ditemukan oleh BPK RI adalah nilai aset tetap sebesar Rp1.817.397.233.570,90, tidak bisa dirinci, karena kekurangakuratan buku



TERIMA LHP

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak, Klemen Apui menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Landak dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudiby. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

inventaris masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

"Permasalahan aset tetap yang lainnya yaitu aset tanah belum bersertifikat dan buku inventaris kurang

informatif yaitu terdapat aset yang belum bernilai, bernilai Rp1,00, dan aset tanah tidak diketahui luasnya, serta pencatatan aset belum dimasukkan ke asset induk," jelasnya. □